

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II, bukan merupakan akhir dari pengembangan senjata nuklir dan bahkan merupakan awal mula persaingan beberapa negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu negara yang ikut terjun ke dalam dunia perkembangan program nuklir ini adalah Korea Utara. Korea Utara memulai program pengembangan nuklirnya yaitu pada tahun 1956 ketika menjalin kerjasama penggunaan energi nuklir dengan Uni Soviet.¹ Selain itu, upaya dalam pengembangan program nuklir ini juga dinilai sebagai salah satu bentuk modernisasi dari kekuatan militer yang dimilikinya.²

Pengembangan program nuklir Korea Utara ini menimbulkan kecemasan dari berbagai lapisan masyarakat internasional, karena diduga berpotensi untuk menjadi aktor yang akan menimbulkan instabilitas di Kawasan Asia Timur. Korea Utara merupakan negara dengan *image* sebagai salah satu negara yang berpotensi menimbulkan krisis di berbagai aspek seperti keamanan dan ekonomi serta kelaparan dan juga kecemasan komunitas internasional dalam memicu munculnya perlombaan senjata (*arm race*).³

Dalam beberapa dekade terakhir Korea Utara telah melahirkan setidaknya 60 jenis misil dengan kapasitas cakupan yang beragam. Beberapa

¹ Perry J. William , "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," Annals of the American Academy of Political Science, Vol. 607 (Sage Publications, Inc. 2006), hlm. 80.

² Perry J. William , "Proliferation on the Peninsula ...": hal 80.

³ Andi Purwono & Ahmad Saifuddin Zuhri. "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional". Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 7, No. 2, Juni 2010. Hal 2

diantaranya adalah rudal nuklir jenis Hwasong-5, Hwasong-6, Hwasong-7, Hwasong-12, Hwasong-13, Taepodong-1, Taepodong-2 dan sebagainya. Khusus untuk rudal balistik jenis Taepodong-2 memiliki daya ledak lebih kurang 6-8 kiloton dinamit.⁴ Sejak Korea Utara memulai program pengembangan dan pengayaan nuklirnya, hal ini sudah menjadi keresahan dan bahkan ancaman bagi dunia internasional khususnya dalam satu atau dua dekade terakhir. Tercatat beberapa kali Korea Utara melancarkan kegiatan uji coba nuklir yang mana diantaranya, yaitu pada tahun 1993 dan 1998. Pada uji coba ketiga pada tahun 2004, Korea Utara melakukan pengetesan pada rudal balistik jenis Taepodong-2 yang pada saat itu memiliki daya ledak mencapai 15 kiloton dinamit yang daya ledaknya melebihi perkiraan yang diprediksi dan hampir sama dengan bom atom tentara sekutu di Hiroshima 1945, dan dilanjutkan pada tahun 2006 dan 2012. Tercatat setidaknya Korea Utara telah melakukan puluhan kali uji coba senjata nuklir.⁵

Beralih kepada negara-negara yang berada di sekitar Korea Utara yang tergabung dalam Kawasan Asia Timur. Tiongkok yang merupakan negara dengan intensitas kerjasama yang tinggi dengan Korea Utara telah menjadi fasilitator berbagai bantuan baik berupa bantuan energi, bantuan pangan dan bantuan ekonomi serta persenjataan militer Korea Utara. Bahkan, Tiongkok sendiri secara tidak langsung mendeklarasikan dukungannya terhadap Korea Utara. Dikutip

⁴ Merdeka.com, “*inilah Senjata Nuklir Korea Utara yang Bikin AS Gemetar.*” Diakses melalui <https://www.merdeka.com/dunia/inilah-senjata-nuklir-korea-utara-yang-bikin-as-gemetar.html>. Pada tanggal 5 September 2019.

⁵ Sony Iriawan, “*Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara*”. Komp. Indonesia Peace and Security Center. Universitas Pertahanan Indonesia. Sentul, Bogor. International & Diplomacy Vol. 3 No.1. 2017. Hal 104

melalui situs berita BBC dalam tajuk rencana surat kabar Korea Utara, Rodong Sinmun, Presiden Tiongkok Xi Jin Ping menyatakan, “*Tiongkok mendukung Korea Utara untuk menjaga arah yang tepat dalam memecahkan persoalan Semenanjung Korea secara politis.*”⁶

Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan merasa bahwa tindakan Korea Utara bukanlah sesuatu yang dapat ditoleransi lagi karena besarnya ancaman yang ditimbulkan. Hal ini terbukti ketika Jepang dan Korea Selatan melakukan rekonstruksi dan reformasi aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat Aliansi pertahanan tiga negara antara Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat memang sudah menjadi fokus investasi Amerika Serikat sendiri sejak pasca perang dingin yang disepakati melalui *bilateral defence alliance*.⁷

Meskipun telah tergabung dalam aliansi pertahanan, Jepang dan Korea Utara juga memiliki sisi dilematis karena sebelumnya ketika mekanisme diplomasi multilateral seperti *six party talk* yang terdiri dari enam negara yaitu, Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Rusia tidak memberikan pengaruh dan perubahan signifikan terhadap proses denuklirisasi Korea Utara. Hanya saja, kerjasama trilateral antara ketiga negara ini juga memiliki sasaran lain yaitu kepada Tiongkok yang dinilai memiliki keterlibatan yang kuat dalam program pengembangan nuklir Korea Utara yang merupakan bentuk strategi *proxy war* milik Tiongkok. Tujuannya agar kerjasama trilateral ini dapat mengupayakan diplomasi kepada Tiongkok agar dapat meredam dan bahkan membujuk Korea Utara untuk terus mengembangkan program nuklirnya yang

⁶ BBC News Indonesia, “*Lawatan Pertama Xi Jinping ke Korea Utara: Mengapa terjadi Sekarang?*” diakses melalui <http://bbc.com/indonesia/dunia-48704622> diakses pada bulan September 2019.

⁷ Sony Iriawan, “*Reformasi Aliansi Pertahanan...*”: Hal. 115

sangat mengancam kawasan.⁸ Dalam pandangan realisme kekhawatiran negara tentang sekuritisasi terhadap faktor-faktor kontrol dapat mempengaruhi kepentingan dan kedaulatan nasional. Oleh sebab itu, suatu negara dapat fokus dalam peningkatan fungsi keamanan apabila terdapat situasi yang mengancam keamanan nasionalnya.⁹

Meskipun Korea Utara menyatakan bahwa program nuklir yang dikembangkannya bertujuan hanya sebatas bentuk proteksi diri dan pencegahan, tetap saja hal ini menimbulkan kecemasan tersendiri oleh Amerika Serikat yang mengklaim bahwa hal ini dapat menimbulkan bahkan meningkatkan resiko yang mengancam keamanan nasional dan tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat.¹⁰ Kecemasan Amerika Serikat ini bukan sebatas penyerangan langsung yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan oleh Korea Utara saja, namun juga kecemasan terhadap kesediaan Korea Utara untuk menjual senjata nuklir dan bahan fisil yang dikembangkannya kepada organisasi kriminal dan organisasi teroris yang mana hal ini nantinya juga akan menimbulkan kerugian tersendiri kepada Amerika Serikat yang notabene menjadi sasaran utama organisasi teroris dunia.¹¹ Dalam sebuah laporan rahasia panel para ahli PBB terdapat data yang menjelaskan bahwa Korea Utara telah terlibat aktivitas perdagangan senjata dengan beberapa negara Timur Tengah dan Afrika seperti Suriah dengan menjual peralatan militer serta diketahui juga bahwa Korea Utara juga melakukan penjualan rudal, senjata

⁸ Sony Iriawan, *“Reformasi Aliansi Pertahanan...: Hal. 111*

⁹ Ranny Emilia, *“A World without Nuclear Power”*. *Andalas Journal of International Studies*. Vol. 1 No. 1. Universitas Andalas. 2012. Hal. 6

¹⁰ PBS Newshour, <http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/northkorea/>. Diakses pada bulan Januari 2019

¹¹ PBS Newshour, <http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/northkorea/>. Diakses pada bulan Januari 2019

konvensional, dan bahan senjata kimia ke Suriah dan Iran.¹² Amerika Serikat juga berpendapat bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini nantinya akan menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar dari saat sekarang, dan harus segera dihentikan karena selain dapat memicu perlombaan senjata namun juga meningkatkan resiko terjadinya konflik yang bisa menghasilkan ratusan hingga jutaan korban tewas dalam beberapa hari perang.¹³ Amerika Serikat juga menilai bahwa dalam beberapa tahun ke depan Korea Utara juga akan memiliki nuklir yang sama dengan yang dimiliki Tiongkok, Perancis, dan Inggris.¹⁴

Adapun setelah pergantian kepemimpinan Amerika Serikat dari era Obama kepada era Donald Trump, hal ini juga berpengaruh kepada kebijakan Amerika Serikat yang mana sebelumnya lebih bersifat persuasif menjadi sedikit mengarah kepada koersif. Dalam merespon langkah Korea Utara yang semakin sulit untuk diajak bekerjasama dalam proses denuklirisasi, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump mengambil momentum politik dengan menerbangkan pesawat pengebom jenis B-1 milik Amerika Serikat di atas perbatasan dengan Korea Utara dalam rangka latihan gabungan antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang yang berlangsung selama 10 jam. Kemudian US Pacific Air Force yang dilansir The Hill mengeluarkan pernyataan yang berbunyi “*our air force will continued to maintain B-1B bomber preparedness to demonstrate US*

¹² Mata-mata Politik, “Seperti Iran, Korea Utara Terungkap ‘Jualan’ Senjata ke Seluruh Dunia”. Diakses melalui www.matamatapolitik.com pada bulan September 2019.

¹³ Kompas, “Pentagon: Hanya Invasi yang Bisa Hancurkan Program Nuklir Korea Utara”. kompas.com/internasional/read/2017/11/06/13431611/Pentagon-Hanya-Invasi-yang-Bisa-Hancurkan-Program-Nuklir-Korut. Diakses pada bulan September 2019.

¹⁴ R. Aditia Harisasongko. *Diplomasi Amerika Serikat terhadap Korea Utara dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Nuklir di Semenanjung Korea (1994-2007)*. Universitas Airlangga. Hal. 191

commitment to stability and security in the Indo-Asia-Pacific region".¹⁵ Tindakan ini mengindikasikan ancaman yang dikeluarkan Amerika Serikat kepada Korea Utara. Selanjutnya, Trump juga memerintahkan pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara melalui perintah eksekutif untuk menutup segala akses keuangan serta embargo ekonomi.¹⁶

Amerika Serikat sebagai negara *super power* tidak menerima legitimasi kemampuan senjata nuklir Korea Utara yang diperoleh rezim Pyongyang dengan melanggar NPT pada tahun 1970. Oleh sebab itu, tujuan utama Amerika Serikat adalah denuklirisasi terkait program nuklir Korea Utara secara sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Namun, Amerika Serikat berusaha mencegah paksaan atau agresi kepada Korea Utara baik pada tingkat konvensional maupun senjata nuklir demi mengurangi resiko kesalahanperhitungan yang berpotensi meningkatkan konflik antar para pengguna senjata nuklir.¹⁷

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat tengah melakukan strategi *deterrence* terhadap Korea Utara. *Deterrence* merupakan strategi yang sangat sering dilakukan oleh negara saat melihat munculnya potensi ancaman. *Deterrence* adalah strategi yang selama ini telah digunakan dan dipraktekkan oleh Amerika Serikat. Tercatat bahwa Amerika Serikat pernah beberapa kali melakukan *deterrence*, yang mana diantaranya pada masa perang

¹⁵ Kumparan, "Trump Terbangkan Dua Pesawat Bomber B-1 ke Semenanjung Korea". www.m.kumparan.com/amp/@kumparannews/trump-terbangkan-dua-pesawat-bomber-b1-ke-semenanjung-korea. Diakses Pada bulan September 2019

¹⁶ Sony Iriawan, "Reformasi Aliansi Pertahanan...": Hal. 105 & 115.

¹⁷ Robert Einhorn & Steven Pifer, "Meeting U.S. Deterrence Requirements Toward a Sustainable National Consensus". Foreign Policy at Brookings. September 2017. Hal. 6

dingin yang melibatkan Berlin dan Uni Soviet.¹⁸ Karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana Amerika Serikat melakukan *deterrence* terhadap Korea Utara.

Maka dari itu, penelitian ini selanjutnya akan berfokus kepada strategi Amerika Serikat dalam merespon pengembangan nuklir Korea Utara menggunakan tindakan *deterrence* yang diambil Amerika Serikat demi tujuannya yaitu denuklirisasi Korea Utara guna menciptakan stabilitas keamanan di Asia Timur dan melindungi negara aliansi Amerika Serikat di Asia Timur. Studi ini dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang ingin memperbandingkan strategi *deterrence* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Korea Utara merupakan salah satu negara yang menjalankan program pengembangan senjata nuklir dan telah memiliki beberapa jenis rudal yang ditenagai oleh nuklir tersebut. Hanya saja, keputusan dan tindakan Korea Utara ini menjadi salah satu hal yang berpotensi ancaman bagi aktor-aktor dunia, sehingga mendapat penentangan dari berbagai negara dan komunitas internasional termasuk PBB. Penentangan ini paling gencar dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara di Kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang yang mayoritas adalah aliansi Amerika Serikat. Tindakan Korea Utara tersebut dapat menyebabkan instabilitas keamanan di Kawasan Asia Timur bahkan di dunia dan juga dapat memicu adanya perlombaan senjata (*arm race*). Oleh sebab itu, Amerika Serikat sebagai negara *super power* dan juga anggota tetap DK-PBB telah mengambil sikap dalam merespon program nuklir Korea Utara. Salah satu bentuk respon yang diambil oleh Amerika Serikat adalah strategi *deterrence*,

¹⁸ Alexander L. George & Richard Sivioke, “*Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice*”. Columbia University Press. New York. 1974

dimana Amerika Serikat mengambil sebuah langkah yang bersifat mengancam guna mendesak Korea Utara melakukan denuklirisasi seperti misalnya memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Selanjutnya, Amerika Serikat juga melakukan rekonstruksi pertahanan dengan Jepang dan Korea Selatan, dan bahkan Amerika Serikat sempat menerbangkan pesawat pengebom B-1 miliknya di atas perbatasan Korea Utara sebagai bentuk ancaman. Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya karena ingin melihat pola-pola dan bentuk respon negara *super power* ketika mendapatkan ancaman bagi keamanan negaranya maupun keamanan negara aliansinya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi *deterrence* yang dilakukan Amerika Serikat terkait pengembangan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan pengaplikasian strategi *deterrence* Amerika Serikat dalam merespon pengembangan program nuklir Korea Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca secara akademik dan praktik, penelitian ini dapat membantu penulis dan pembaca dalam memahami strategi *deterrence* Amerika Serikat salah satu upaya suatu negara *super power* dalam merespon kebijakan negara lain yang berpotensi sebagai ancaman bagi Amerika Serikat sendiri dan juga bagi negara-negara aliansinya. Selanjutnya, studi ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi

studi lanjutan yang ingin memperbandingkan strategi *deterrence* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di dunia.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian mengenai strategi Amerika Serikat terhadap program nuklir Korea Utara ini, penulis menggunakan beberapa tulisan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sebagai acuan dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Adapun beberapa sumber yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Selly Meilianawati dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan *Extended Deterrence* Amerika Serikat terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea”¹⁹ yang diterbitkan oleh eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 5, Nomor 4 tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan tentang kompleksnya kondisi dan situasi di wilayah Semenanjung Korea yang dipicu oleh program pengembangan nuklir Korea Utara dan respon Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan yang notabeneanya adalah negara yang terangkum dalam Kawasan Asia Timur dan berada di sekitar wilayah Semenanjung Korea.

Jurnal ini juga membahas aliansi pertahanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan yang menyebabkan kompleksitas yang tinggi di Semenanjung Korea karena memicu adanya *Security Dilemma* antara Jepang, Tiongkok, Korea Utara, dan Korea Selatan. Selain itu, tulisan ini juga mengambil titik berangkat yaitu upaya tiap-tiap negara di internal Semenanjung Korea dalam mempertahankan *status quo* Semenanjung Korea itu sendiri. Adanya efek timbal

¹⁹ Selly Meilianawati, “Pengaruh Implementasi Kebijakan *Extended Deterrence* Amerika Serikat terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 5, No. 4. 2017. Hal 1331-1338

balik yang terjadi karena aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan, dimana hal ini semakin menyudutkan dan menempatkan Korea Utara dalam kondisi terancam sehingga Korea Utara semakin gencar dalam melakukan pengembangan dan uji coba senjata nuklirnya. Selain itu, jurnal ini juga membahas bagaimana *security dilemma* antara Jepang dan Tiongkok yang memiliki status sebagai negara internal Semenanjung Korea. Tercatat bahwa Tiongkok telah mengumumkan peningkatan pengeluaran militer yang rata-rata hingga dua digit per tahunnya. Sedangkan Jepang meningkatkan kepemilikan senjata konvensional dan menggunakan *self-defense force* dalam menjaga perdamaian di Semenanjung Korea.

Perbedaan penelitian milik Selly Meilianawati ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada fokus bahasannya. Penelitian milik Selly Meilianawati ini berfokus kepada kebijakan Amerika Serikat dalam mengambil tindakan *extended deterrence* yaitu dengan melakukan aliansi dengan Korea Selatan yang berdampak pada adanya peningkatan kompleksitas dan memicu munculnya *security dilemma* di Semenanjung Utara. Sedangkan, penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana strategi *deterrence* Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi Korea Utara.

Referensi dan acuan kedua penulis yaitu merujuk kepada jurnal “*Meeting U.S. Deterrence Requirements Toward a Sustainable National Consensus*”²⁰. Karya dari Robert Einhorn dan Steven Pifer ini membahas mengenai modernisasi dari strategi *deterrence* Amerika Serikat. Dalam penelitiannya, Einhorn

²⁰ Robert Einhorn & Steven Pifer, “*Meeting U.S. Deterrence Requirements toward a Sustainable National Consensus*”. Foreign Policy at Brooking. September 2017.

menjelaskan tentang hal-hal yang paling mendesak dari strategi *deterrence* Amerika Serikat bukanlah ancaman serangan nuklir yang akan dilancarkan oleh Korea Utara terhadap tanah air Amerika Serikat, akan tetapi, kemungkinan bahwa Korea Utara sebagai negara dengan status pemilik senjata nuklir akan menggunakan eskalasi ancaman nuklir untuk bertindak lebih agresif di lingkup wilayah Semenanjung Korea dan Asia Timur.

Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai prioritas utama Amerika Serikat dalam membela negara aliansinya serta memperkuat pencegahan di tingkat regional. Maka dari itu, Amerika Serikat akan membutuhkan penguatan dalam sektor kemampuan militer konvensional dan memastikan kredibilitas komponen penangkal nuklir Amerika Serikat yang disebar di beberapa titik sebagai sistem pencegahan dan juga menjaga solidaritas dan tekad aliansinya. Amerika Serikat dan negara aliansinya juga membutuhkan modernisasi pada sistem pusat strategis dan infrastruktur pendukung yang menjadi landasan kebijakan *deterrence* Amerika Serikat dalam mempertahankan dan memperluas pencegahan ancaman berupa serangan langsung ke negara Amerika Serikat dan memberikan jaminan kepada sekutu Amerika Serikat sendiri.

Penelitian terdahulu milik Robert Einhorn dan Steven Pifer ini penulis jadikan sebagai salah satu acuan dalam mengidentifikasi strategi-strategi *deterrence* Amerika Serikat dalam merespon program nuklir Korea Utara dan juga menjaga stabilitas di Kawasan Asia Timur. Peneliti juga dapat menjadikan jurnal ini sebagai salah satu referensi pendukung untuk melihat pertimbangan-pertimbangan serta hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Amerika Serikat dalam proses denuklirisasi Korea Utara.

Sumber selanjutnya dalam tulisan ini adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri dengan judul “Peran Nuklir Korea Utara sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional”²¹ yang diterbitkan oleh Spektrum, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Jurnal ini menjelaskan posisi serta kondisi Korea Utara yang sempat di klaim sebagai negara miskin akibat dampak dari perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi di Semenanjung Korea yang membuat Korea Utara mengalami krisis ekonomi yang menyulitkan negara yang terletak di Kawasan Asia Timur tersebut.

Korea Utara didorong kondisi ekonominya yang semakin melemah juga sempat melakukan gebrakan besar dengan mengambil langkah swasembada pangan dan juga nasionalisasi lahan dan industri guna menunjang perekonomiannya serta melakukan modernisasi angkatan bersenjata, pertanian, dan industri negara. Belakangan ini Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia karena melakukan pengembangan dan pengayaan nuklir untuk memodernisasi kekuatan militernya, serta sebagai strategi untuk penguatan posisinya di dunia internasional. Selain itu, pengembangan nuklir oleh Korea Utara juga bertujuan sebagai alat memenuhi kepentingannya dalam permasalahan sistem politik luar negerinya yang berada dalam kondisi terisolasi. Nuklir ini juga dijadikan Korea Utara sebagai andalan untuk meningkatkan posisi tawarnya (*bargaining position*) di percaturan internasional.

Penelitian ini dapat penulis gunakan sebagai acuan dalam memahami posisi dan kondisi Korea Utara yang selama prosesnya sangat mengandalkan nuklir sebagai alat atau instrumen diplomasi demi untuk memenuhi

²¹ Andi Purwono & Ahmad Saifuddin Zuhri, “Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional”. Spektrum Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 7, No. 2, Juni 2010

kepentingannya sebagai negara yang dikecam oleh banyak aktor internasional serta untuk kembali memperbaiki posisi dan juga perekonomian negara Korea Utara itu sendiri dengan harapan bisa mengandalkan nuklir sebagai alat untuk dicabutnya sanksi keuangan internasional yang diterimanya.

Referensi keempat yang penulis jadikan salah satu sumber acuan dalam melakukan penelitian ini adalah jurnal yang dirilis oleh Congressional Research Service yang memuat tulisan milik Kathleen J. McInnis, dkk, yang berjudul “*The North Korean Nuclear Challenge: Military Options and Issues for Congress*”²². Jurnal ilmiah ini menjelaskan tentang pencapaian yang dilakukan oleh Korea Utara terkait pengembangan program nuklirnya yang pada Juli 2017 telah berhasil melakukan ujicoba nuklir balistik antar benua dan kemungkinan bahwa Korea Utara juga telah berhasil dalam membuat miniatur hulu ledak nuklir.

Tulisan pada jurnal ini juga menjelaskan opsi-opsi yang dapat diambil oleh Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang mengalami ancaman paling besar dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Korea Utara untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk seperti penyerangan langsung dan agresi oleh Korea Utara sendiri. Selain itu, di dalam tulisan ini mengkaji apakah Amerika Serikat dapat mengelola dan mengatasi kemungkinan tersebut, dan apakah Amerika Serikat dapat menggunakan serangan militer untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Korea Utara dengan modal senjata nuklir yang dimilikinya.

Posisi Amerika Serikat yang dilema dalam mengambil tindakan militer atau tidak juga membahas mengenai tantangan-tantangan dari setiap tindakan dan

²² Kathleen J. McInnis, dkk, “*The North Korean Nuclear Challenge: Military Options and Issues for Congress*”. Congressional Research Service. November 2017.

respon dari Amerika Serikat itu sendiri, khususnya mengenai respon dengan melakukan serangan militer terhadap Korea Utara. Setiap pilihan yang diambil oleh Amerika Serikat akan menghasilkan resiko yang berbeda. Tulisan milik Kathleen ini juga mengidentifikasi beberapa opsi yang mungkin dapat diambil oleh Amerika Serikat beserta resiko-resiko yang akan terjadi apabila menggunakan kekuatan militer.

Referensi kelima yang penulis jadikan sebagai salah satu sumber yaitu jurnal ilmiah karya Emma Chanlett-Avery, Mark E. Manyin, dkk, yang berjudul “*North Korea: U.S Relation, Nuclear Diplomacy and Internal Situation*”²³ yang diterbitkan oleh Congressional Reasearch Service pada Juli 2018. Jurnal ini menjelaskan tentang kondisi terbaru mengenai hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara yang selama ini telah mengalami banyak ketegangan terkait pengembangan program nuklir Korea Utara dan keinginan Amerika Serikat yang mengupayakan denuklirisasi Korea Utara.

Dalam tulisan Emma Chanlett-Avery, Mark E. Manyin, dkk ini di klaim bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara telah memasuki babak baru yang mulai mengalami penurunan ketegangan antara kedua aktor yang kerap terlibat perselisihan. Dimulai sejak kepemimpinan Presiden Donald Trump yang melihat perkembangan yang sangat pesat yang dialami oleh pengembangan nuklir Korea Utara pada tahun 2016 dan 2017 yang menjadikan Korea Utara dan nuklirnya sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur dan menjadi ancaman langsung ke negara Amerika Serikat itu sendiri. Maka dari itu, Korea Utara dijadikan sebagai target sejumlah sanksi Amerika

²³ Emma Chanlett-Avery, dkk, “*North Korea: U.S Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*”. Congressional Reasearch Service. Juli, 2018

Serikat dan Dewan keamanan PBB.

Pada 2018, Pemerintahan Amerika Serikat dan Korea Utara di bawah kepemimpinan Trump dan Kim Jong Un membuka babak baru dalam hubungan kedua negara tersebut, setelah selama 2017 mengalami ketegangan dan retorika bermusuhan dari kedua pihak termasuk perluasan Amerika Serikat dan sanksi internasional terhadap Korea Utara, Kim dan Trump mengadakan pertemuan para pemimpin di KTT Singapura pada Juni 2018. Pertemuan tersebut menghasilkan prinsip-prinsip untuk membangun hubungan yang positif.

Penelitian tentang hubungan babak baru antara Amerika Serikat dan Korea Utara ini membantu penulis memahami dinamika terbaru tentang proses denuklirisasi Korea Utara dan juga bentuk upaya Amerika Serikat dalam mewujudkan hal tersebut. Selain itu, tulisan terdahulu ini juga membantu penulis dalam penelitian yang akan dilakukan ini bagaimana bentuk hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara kedepannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati pada KTT Singapura 2018.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Deterrence Theory*

Konsep *deterrence* secara umum adalah strategi yang bersifat defensif yang dikembangkan pada masa setelah Perang Dunia I dan digunakan selama Perang Dingin. *Deterrence* bertujuan untuk meyakinkan pihak musuh untuk tidak melakukan tindakan dengan menjelaskan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Apabila pihak musuh bertindak melewati batas, maka aktor akan mengambil tindakan yang bersifat menghukum.²⁴

Deterrence mengacu kepada tindakan untuk melakukan pencegahan agar target atau sasaran diplomasi tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan, dan apabila sasaran tetap melakukan tindakan yang telah dicegah, maka hukuman dapat dijatuhkan sesuai dengan ancaman yang telah diberikan. *Deterrence* sendiri diibaratkan dengan “permainan menunggu” yang masih melindungi *status quo*, yang mana dimulai dengan tuntutan dan tekanan terhadap pihak sasaran yang berlanjut sampai pihak tersebut memutuskan untuk mematuhi dan membatalkan tindakannya tersebut. Terdapat tiga aktivitas *deterrence*, yaitu: 1) membujuk untuk menghentikan niatnya; 2) mengambil tindakan, seperti melakukan penarikan dari lokasi; 3) perubahan kebijakan melalui perubahan pemerintah.²⁵

Deterrence sendiri yaitu membuat berbagai ancaman militer yang digunakan untuk mencegah aktor lain untuk melakukan tindakan agresif. Strategi ini berupaya untuk menghentikan segala tindakan yang tidak dikehendaki sebelum terjadi atau dengan kata lain sebagai tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat menimbulkan kerugian yang besar. Konsep *deterrence* ini mencakup *denial* (penyangkalan) dan *retaliation* (pembalasan).²⁶ Barry Buzan dalam bukunya menjelaskan tentang

²⁴ Branislav L. Slantchev, “Introduction to International Relations, Lecture 8: Deterrence and Compellence”, Department of Political Science, University of California – San Diego, 2005.

²⁵ Romeo, Silvia. “Coercive Diplomacy, Theories and Application: A Case Study on U.S Administration and Libya”. LUISS, Department of Political Science, Major in Politics, Philosophy and Economics Chair in Conflict and Development. 2015

²⁶ Barry Buzan, “An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations”, MacMillan Press, London, 1987, p. 136.

deterrence yaitu “One actor prevents another from taking some action by raising the latter’s fear of the consequences that will ensue”.²⁷

Dalam konsep *deterrence*, aktor mengambil sikap dengan meningkatkan kemampuan dan kekuatan yang umumnya bersifat materialis untuk menyangkal serangan yang dilancarkan pihak musuh, atau dengan tujuan lain yaitu mendesak dan memaksa musuh agar berpikir ulang dalam melakukan serangan. Konsep ini kemudian dimanifestasikan kedalam salah satu strategi militer yang bertujuan untuk mendominasi negara lain atau pihak musuh dengan memaksimalkan kemampuan militer baik secara fisik maupun non-fisik (doktrin militer).²⁸

Dalam konsep *deterrence*, terdapat beberapa perbedaan dalam cara pengaplikasiannya agar dapat menghambat atau mencegah pelanggaran, yaitu:²⁹

1. Memberi pengetahuan mengenai sanksi untuk mempengaruhi tentang biaya pelanggaran, sehingga kepatuhan dapat menjadi opsi yang menarik daripada melanggar atau menyerang.
2. Pengetahuan tentang sanksi dan kemudian ditambah dengan meyakinkan tentang kejelasan hukum dan otoritas hukum yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini mungkin akan mampu untuk menggiring musuh untuk patuh.
3. Sanksi juga memungkinkan memiliki efek moral-edukatif dan habituatif, sehingga pihak musuh dapat secara kausal terlibat dalam penghambatan

²⁷ Barry Buzan, “*An Introduction to Strategic, ...*”: Hal. 163.

²⁸ John Baylis & dkk, “*Strategy in the Contemporary World*”. Oxford University Press, 2002. 161-170.

²⁹ Barry Elliot, “*Deterrence Theory Revisited*”. New Zealand. 2003. Hal. 2

moral dan hukum serta tuntutan akan dipenuhi karena adanya *force of habit*.

4. Mengeksekusi sanksi yang telah diberikan dan bukan hanya sekedar ancaman. Hal ini dapat mengurangi tingkat pembangkangan dari pihak musuh dan meningkatkan kepatuhan dengan melumpuhkan pelaku potensial, mereformasi atau dengan melalui stigmatisasi pada musuh. Secara tidak langsung dengan tekanan informal sehingga tuntutan dapat dipatuhi.

Dalam menjalankan strategi *deterrence*, aktor harus dapat mengacu kepada beberapa kombinasi dari mekanisme yang berbeda karena *deterrence* merupakan strategi untuk mencapai kepatuhan dari target dan bukan hanya sebatas pencegahan. Pernyataan tersebut mengacu pada gagasan bahwa setiap orang akan menimbang *costs* dan *benefits* dalam memutuskan untuk tidak menyerang dan biaya (*cost*) adalah hukuman yang akan membuat mereka terancam. Sederhananya, filosofi yang mendasari *deterrence* ini adalah bahwa resiko bagi pihak yang melanggar harus dibuat sedemikian besar dan konsekuensi yang berat, sehingga orang-orang percaya bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak kehilangan dari satu atau berbagai aspek daripada mendapatkan sesuatu dari tindakan pelanggaran.³⁰

Deterrence yang notabeneanya adalah tindakan pencegahan (*preventive measure*) memiliki tiga macam efek yaitu, *pertama*, efek jera –intimidasi; *kedua*, penguatan pada hambatan-hambatan moral –pendidikan; dan *ketiga*, stimulasi terhadap hukum kebiasaan yang memiliki tingkah laku yang kuat. Terdapat

³⁰ Barry Elliot, “*Deterrence Theory Revisited*”. New Zealand. 2003. Hal. 2

perbedaan antara pencegahan primer atau langsung (efek intimidasi dari hukuman secara umum dan spesifik) dan pencegahan sekunder atau tidak langsung. Pencegahan sekunder lebih mengacu kepada kemampuan sanksi formal untuk merangsang, memperkuat dan memobilisasi ketidaksetujuan sosial informal dan peran dalam menopang iklim normatif masyarakat. Menurut Salem & Bower (1970), pencegahan sekunder lebih substansial daripada efek intimidasi langsung.³¹

Glenn Synder mendefinisikan *deterrence* adalah sebagai suatu kebijakan yang menggunakan prinsip *stick and carrot*. Kebijakan ini adalah kebijakan yang selama ini telah digunakan dan dipraktekkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tersebut telah mencegah pihak lain untuk memberikan suatu ancaman dengan cara menjatuhkan sanksi positif yang berupa hadiah ataupun insentif bagi mereka yang mematuhi apa yang dilarang oleh Amerika Serikat, namun sebaliknya juga akan memberikan sanksi negatif yang berupa ancaman atau hukuman bagi mereka yang tidak berperilaku taat.³²

Konsep *deterrence* ini peneliti gunakan untuk mengidentifikasi tindakan dan strategi Amerika Serikat dalam merespon pengembangan nuklir Korea Utara yang bukan hanya menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, namun juga menjadi penyebab instabilisasi di Kawasan Asia Timur. Dengan mengidentifikasi strategi dari Amerika Serikat, maka tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat terkait program nuklir Korea Utara dapat dijelaskan secara empiris dan rasional.

³¹ Barry Elliot, "*Deterrence Theory Revisited*". New Zealand. 2003. Hal. 3

³² Patrick M. Morgan, "*Deterrence Now*", Cambridge University Press, 2003

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ilmu hubungan internasional merupakan sebuah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan sebagai upaya dalam memperoleh data dan pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam kajian keilmuan hubungan internasional.³³

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan menekankan pada kedalaman makna ataupun data serta bukan termasuk kepada perluasan data. Metode penelitian kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka dan atau data statistik.³⁴ Cara memperoleh data dari penggunaan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, pidato-pidato yang disampaikan oleh tokoh-tokoh penting dalam penelitian ini yang membahas mengenai strategi Amerika Serikat terhadap Korea Utara terkait dengan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara serta hal-hal terkait lainnya.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan batasan yaitu pada periode kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 sampai 2019. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahan

³³ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3S. Jakarta 1994.

³⁴ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara, Sosial Humaniora*, Universitas Indonesia 9 No. 2, 2005 : 57-65

Donald Trump, Amerika Serikat telah beberapa melakukan tindakan yang diidentifikasi sebagai salah satu bentuk strategi *deterrence* terhadap Korea Utara terkait program pengembangan nuklirnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Donald Trump terjadi pergantian arah kebijakan Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi Korea Utara ke arah yang lebih keras setelah sebelumnya pada masa kepemimpinan Barrack Obama. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengangkat unit analisis yaitu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi unit analisis adalah karena yang akan penulis bahas dalam penelitian ini ialah strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam proses denuklirisasi Korea Utara.

Sedangkan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati disebut sebagai unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen.³⁶ Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah ancaman yang diperlihatkan Korea Utara sehubungan dengan program pengembangan nuklirnya. Tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan dan penjabaran sebuah penelitian.³⁷ Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat *state* atau negara. Hal ini ditentukan karena dalam

³⁵ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Pustaka LP3S. Jakarta. 1994. Hal. 39

³⁶ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Pustaka LP3S. Jakarta. 1994. Hal. 39

³⁷ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Pustaka LP3S. Jakarta. 1994. Hal. 36

penelitian ini penulis melihat tindakan yang diambil dan dilakukan oleh Amerika Serikat ialah berupa *deterrence*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau *secondary data*, yakni mengambil dan menganalisis dari data-data yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data-data yang relevan dari sumber yang berbentuk literatur akademik yang berkaitan dengan pengembangan program nuklir Korea Utara, Amerika Serikat dan juga interaksi kedua negara ini termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan strategi *deterrence* Amerika Serikat. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.³⁸

Pada penelitian ini, peneliti banyak mengambil data dan informasi yang berkaitan dengan strategi *deterrence* Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Korea Utara ini dari berita-berita seperti misalnya CNN News, BBC News, Liputan6, dan situs-situs berita lainnya dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti misalnya “*deterrence theory pdf*”, “*THAAD pdf*”, “interaksi Amerika Serikat dan Korea Utara”, “nuklir Korea Utara”, “berita nuklir Korea Utara”, dan “sanksi-sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Korea Utara”. Peneliti mengumpulkan beberapa berita dan artikel yang berkaitan langsung dengan Korea Utara dan Amerika Serikat dan kemudian menjelaskan tentang interaksi kedua negara tersebut dalam konteks pembahasan nuklir Korea Utara. Selain itu, peneliti

³⁸ M. Nazir, “*Metode Penelitian*”. Ghalia, 2003. Hal. 27

juga mengumpulkan data dari beberapa dokumen seperti misalnya dokumen pertahanan Amerika Serikat, jurnal akademik lainnya seperti *Congressional Research Service*, dan artikel-artikel akademik mengenai program nuklir Korea Utara sebagai instrumen diplomasi pemerintahin Korea Utara, serta artikel yang membahas mengenai kerjasama pertahanan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan cara yang dipakai untuk menemukan dan memberikan arti pada serangkaian data dalam penelitian ini.³⁹ Untuk menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian ini, penulis melakukan analisis data sebagai berikut:

Pertama, tahap pengelompokkan data. Peneliti melakukan pengelompokkan data yang sudah dikumpulkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan alur dan jalannya penelitian ini. Awalnya, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data terkait program pengembangan nuklir Korea Utara dan juga ancaman yang dapat ditimbulkan dari program nuklir Korea Utara tersebut. Kemudian hal-hal yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur dan Semenanjung Korea dan yang terakhir adalah aktivitas Amerika Serikat yang tergolong tindakan *deterrence* terhadap Korea Utara untuk mencapai kepentingannya.

Kedua, tahap reduksi data, dimana peneliti melakukan penyaringan terhadap data-data yang sudah terkumpul dan sudah dikelompokkan sebelumnya.

³⁹ Mochtar Mas'ood, "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*". Pustaka LP3S. Jakarta. 1994. Hal. 9

Tujuan dari tahap reduksi data ini adalah untuk menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Dalam tahap ini, peneliti akan mengeliminasi data-data yang tidak berkaitan sama sekali dengan nuklir Korea Utara, kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan Asia Timur dan respon Amerika Serikat terhadap nuklir Korea Utara. Hal ini dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data-data dari hasil penyaringan inilah yang kemudian menjadi sumber dasar untuk melakukan penelitian ini. Proses seleksi data dilakukan dengan proses membaca *skimming* pada setiap bahan yang telah dikumpulkan untuk melihat secara garis besar apakah data tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian ini atau tidak.

Ketiga, tahap interpretasi dan penyajian data. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemaknaan terhadap setiap bahan yang telah dikumpulkan, dan kemudian data-data yang tersedia tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Pada Bab I, peneliti mengedepankan hal-hal dasar yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dan hal tersebut yang menjadi landasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Pada Bab II, peneliti menyajikan data mengenai proses dan sejarah dari perkembangan program nuklir Korea Utara serta potensi ancaman yang ditimbulkan oleh nuklir Korea Utara tersebut khususnya di wilayah Semenanjung Korea berdasarkan kepada data-data yang telah dikelompokkan dan disaring sebelumnya. Pada Bab III, peneliti menjelaskan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea serta gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara terhadap Amerika Serikat dalam mencapai kepentingannya. Kemudian pada Bab IV, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan kerangka konseptual yaitu strategi *deterrence*. Analisis

pada Bab IV ini peneliti lakukan berdasarkan kepada fenomena-fenomena dari interaksi antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang kemudian diidentifikasi sebagai bentuk strategi *deterrence* Amerika Serikat dalam merespon pengembangan program nuklir Korea Utara.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB 2: Perkembangan Program Nuklir Korea Utara dan Ancaman yang Diberikan

Dalam Bab ini terdapat penjelasan mengenai sejarah singkat perkembangan nuklir dunia dan Korea Utara yang berawal dari kerjasama penggunaan energi nuklir dengan Uni Soviet pada tahun 1956 . Bab ini juga membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program nuklir Korea Utara seperti motif-motif pengembangan program nuklir Korea Utara yaitu *regime survive, economic reason, dan security reason* serta potensi ancaman yang dapat ditimbulkan pengembangan nuklir Korea Utara tersebut seperti kebocoran zat radioaktif, gempa bumi, dan mengganggu instabilitas keamanan kawasan. Hal ini menjadi dasar permasalahan dan menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini.

BAB 3: Kepentingan Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan Gangguan yang diberikan Nuklir Korea Utara

Pada Bab ini peneliti membahas mengenai kepentingan dari Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea yang menjadi motivasi dari Amerika Serikat untuk mengupayakan dan merealisasikan denuklirisasi Korea Utara. Kepentingan Amerika Serikat tersebut juga berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi seperti investasi dan relokasi perusahaan-perusahaan dan pabrik serta kepentingan lain yaitu penyebaran pengaruh dan upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya di Kawasan Asia Pasifik. Bab ini juga membahas tentang gangguan dari nuklir Korea Utara terhadap kepentingan yang ingin di capai oleh Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea yaitu ancaman terhadap negara aliansi Amerika Serikat yaitu Korea Selatan dan Jepang yang menjadi poros penyebaran pengaruh Amerika Serikat di Asia.

BAB 4: Analisis Strategi *Deterrence* Amerika Serikat dalam Merespon Pengembangan Program Nuklir Korea Utara

Dalam Bab ini peneliti menjelaskan tentang analisis mengenai bagaimana Amerika Serikat mengimplementasikan strategi *deterrence* dalam upaya denuklirisasi Korea Utara serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Semenanjung Korea dan Asia Timur melalui tindakan-tindakan dan fenomena interaksi Amerika Serikat dan Korea Utara. Analisis yang peneliti lakukan menggunakan kerangka konseptual yaitu *Deterrence Theory* seperti yang telah diuraikan pada Bab 1 bagian kerangka konseptual. Pada bagian analisis ini peneliti menemukan bahwa strategi *deterrence* Amerika Serikat terhadap Korea Utara ini dilakukan dalam berbagai tindakan seperti sanksi ekonomi, penguatan

sistem pertahanan dan perundingan melalui KTT Amerika Serikat dan Korea Utara.

BAB 5: Penutup

Bab penutup berisikan kesimpulan pada penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan terkait “Strategi *Deterrence* Amerika Serikat Dalam Merespon Pengembangan Program Nuklir Korea Utara” serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.

